

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Kinerja Auditor

2.1.1.1 Definisi Kinerja Auditor

Menurut Fauzi & Nugroho (2020:2) mendefinisikan kinerja auditor sebagai berikut:

“Kinerja adalah suatu penampilan kerja maupun hasil yang dicapai oleh seseorang baik barang/produk maupun berupa jasa yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian atas diri karyawan atau organisasi kerja yang bersangkutan yang mencerminkan pengetahuan karyawan tentang pekerjaannya itu.”

Menurut Anwar Mangkunegara (2014:9) mengemukakan bahwa Kinerja Auditor adalah:

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor merupakan hasil kerja dari seorang auditor ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dalam kegiatan audit.

2.1.1.2 Indikator Kinerja Auditor

Menurut Heri (2017:262) kinerja auditor sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya.

1. Faktor Pengetahuan

Menurut Wardah (2019:14) Pekerjaan audit menuntut memiliki kemampuan profesional untuk melakukan tugas audit yang dibebankan. Oleh sebab itu, auditor wajib memiliki pengetahuan teknis yang harus dikuasai. Auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi risiko kecurangan.

2. Faktor Keahlian

Dalam SPAP 2001 menjelaskan bahwa audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor.

Menurut Wahidi et al., (2020:219) terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukur kinerja auditor, yaitu:

1. Kualitas Kerja

Mutu penyelesaian dengan bekerja berdasarkan pada seluruh kemampuan dan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor.

2. Kuantitas Kerja

Jumlah hasil yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor, serta kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu yaitu ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia.

Berdasarkan indikator-indikator kinerja auditor di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor dapat diukur melalui bagaimana seorang auditor dapat menyelesaikan tugasnya yang dilihat dari kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor.

2.1.2 Konsep Independensi

2.1.2.1 Definisi Independensi

Menurut Hasanuddin (2020:38-39) berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA Seksi 220), dijelaskan bahwa:

“Independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan didalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang di miliki, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.”

Menurut Nasution et al., (2019:63) mendefinisikan independensi auditor sebagai berikut:

“Independensi auditor adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa independensi yaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan tidak mudah dipengaruhi dalam melakukan kegiatan pemeriksanaan laporan keuangan.

2.1.2.2 Indikator Independensi

Menurut Yohanes Susanto (2020:46-47) terdapat lima hal pokok yang berkaitan dengan independensi auditor, yaitu:

1. Kualitas personal

Kualitas pribadi auditor berkaitan dengan kejujuran dan kekuatan karakter seseorang dalam melakukan audit sehingga ia mampu mempertahankannya dari tekanan pihak lain atau tekanan dari dirinya sendiri untuk mengesampingkan independensi.

2. Kebebasan yang diperoleh pihak lain

Kebebasan yang diperoleh pihak lain, terutama manajemen klien, memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebebasan auditor. Apabila mereka bisa mengendalikan auditor maka mereka akan mewujudkannya bisa ada kepentingan-kepentingan tertentu dari mereka. Begitupun, efektifitas dari kebebasan yang dipengaruhi oleh pihak lain akan ditentukan oleh respons dari auditor sendiri.

3. Hubungan Personal Auditor

Mempunyai hubungan pribadi atau hubungan kepentingan lainnya di luar audit dengan auditan atau orang-orang tertentu dari lingkungan klien. Hubungan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sikap loyal, atau perilaku emosional yang mempengaruhi objektivitas auditor.

4. Kepentingan Keuangan

Kepentingan keuangan auditor dalam hal keuangan, baik langsung maupun tidak langsung, seperti hubungan investasi, pinjam meminjam, dan transaksi dagang, maupun ketergantungan manfaat ekonomis dan honorarium yang diperoleh auditor dari kliennya.

5. Solidaritas Profesi

Kadar solidaritas antar anggota profesi auditing dapat berpengaruh pada upaya saling melindungi antar mereka, atau saling mengawasi di antara mereka.

Menurut Hasanuddin (2020:40) independensi akuntan publik dipengaruhi oleh indikator:

1. Persaingan antar akuntan publik

Persaingan yang tajam dapat mengakibatkan solidaritas profesional yang rendah, hal ini disebabkan karena kantor akuntan publik khawatir klien akan mencari kantor akuntan publik lainnya yang dapat mengeluarkan opini sesuai dengan yang diinginkan klien.

2. Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien

Memberikan jasa konsultasi pada klien yang diaudit dapat meningkatkan resiko rusaknya independensi auditor lebih besar.

3. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penggolongan ukuran besar kecilnya kantor akuntan publik sesuai dengan AICPA dikatakan besar jika kantor akuntan publik tersebut telah melaksanakan audit pada perusahaan *go-public*. Dikatakan kecil jika KAP tersebut belum melakukan audit pada perusahaan *go-public*.

4. Lamanya hubungan antara KAP dengan klien

Lamanya penugasan audit terhadap klien yaitu lima tahun atau kurang dari lima tahun. Dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pendekatan antara

auditor dengan klien yang dapat merusak independensi akuntansi dan dapat terjadinya skandal akuntansi.

Berdasarkan indikator-indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan klien dengan auditor baik dari pemberian hadiah kepada auditor sampai lamanya hubungan dengan auditor serta kualitas personal seorang auditor sangat mempengaruhi independensi seorang auditor.

2.1.3 Konsep *Good Governance*

2.1.3.1 Definisi *Good Governance*

Menurut Riska Franita (2018:10) mendefinisikan *good governance* sebagai berikut

“*Good Governance* adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.”

Menurut Evan Hamzah Muchtar (2021:22) mengungkapkan bahwa:

“Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* biasa disebut juga dengan *Good Governance* atau *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.

2.1.3.2 Indikator *Good Governance*

Menurut Hasanuddin, (2020:43-46) *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menguraikan prinsip *Good Governance*, yaitu:

1. Keadilan (*Fairness*)

Akuntan publik dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Prinsip *fairness* diharapkan untuk membuat seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*) sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham serta *fair* (jujur dan adil).

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Akuntan publik hendaknya berusaha untuk selalu transparansi (terbuka) terhadap informasi atas laporan keuangan klien yang diaudit.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu akuntan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntan publik menjelaskan peran

dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan dan juga pelaporan. Beberapa bentuk implemementasi dari akuntabilitas adalah adanya praktek internal audital yang efektif serta kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan *Statement of Corporate Intent* (target pencapaian perusahaan di masa depan). Apabila prinsip akuntabilitas diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dan komisaris, serta direksi.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan akuntan bahwa dalam hal penugasannya, akuntan publik mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada klien dan pemakai laporan keuangan.

5. Objektif/ Tidak Memihak (*Independency*)

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Menurut Evan Hamzah Muchtar (2021:38-39) terdapat prinsip *good governance* yang meliputi:

1. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Kemandirian (Independency)*

Independensi yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Kewajaran (Fairness)*

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hal pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dari indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa indikator *good governance* merupakan keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan independensi (*independency*).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor

Independensi berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan karakteristik penting bagi seorang auditor serta merupakan suatu dasar atas lima prinsip objektivitas. Dalam tugasnya sebagai auditor, independensi dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam menghasilkan laporan audit dan juga dalam penerbitan opini audit (Arens et al., 2011:74).

Berdasarkan hasil penelitian I Putu Parta Yadnya dan Dosik Ariyanto (2017) bahwa independensi auditor merupakan suatu sikap kejujuran seorang auditor untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan kesungguhan hati agar menghasilkan kinerja yang maksimal dan tinggi. Tingginya independensi yang dimiliki oleh seorang auditor akan diikuti pula dengan tingginya kinerja auditor.

Hal tersebut menunjukkan independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Grece Setiawan dan Made Yenni Latrini (2016) bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal tersebut ditunjukkan dari independensi auditor, jika independensi yang dimiliki seorang auditor tinggi, maka pihak lain akan sulit untuk memengaruhi maupun mengendalikan auditor yang dimana auditor akan selalu

mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemukan dalam melakukan pengauditan, dan juga dalam merumuskan maupun dalam menyatakan pendapatnya dan dengan begitu akan menghasilkan dampak yang memengaruhi pada tingkat pencapaian auditor yang akan semakin baik dengan bahasa lain yakni menghasilkan kinerja yang lebih baik.

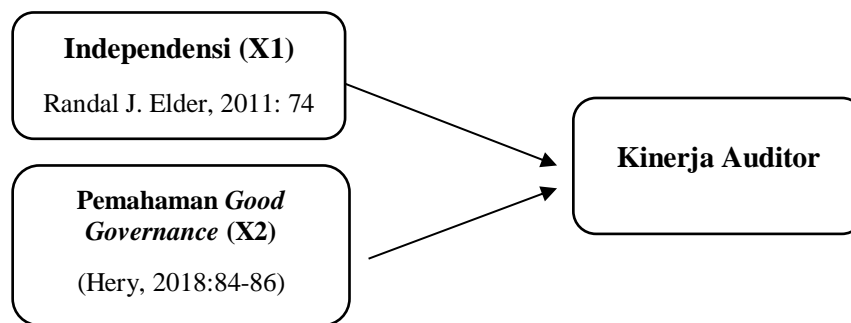
2.2.2 Pengaruh Pemahaman *Good Governance* terhadap Kinerja Auditor

Menurut Hasanuddin (2020:41) Konsep *good governance* dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Dengan demikian agar *good governance* tercipta maka harus ada keterlibatan dan kesungguhan dari berbagai pihak (internal maupun eksternal perusahaan).

Auditor internal sebagai bagian internal dari perusahaan harus memainkan peran yang penting dalam mewujudkan terciptanya *good governance*. Maka, apabila seorang auditor yang memahami konsep *good governance* akan mempengaruhi perilakunya dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan (auditing) dengan orientasi memperoleh hasil yang baik sehingga mempengaruhi kinerja auditor menjadi lebih baik (Heri, 2017:84-86).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Virginia Xena Francisca Talise (2019) menunjukkan bahwa pemahaman *good governance* oleh auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman auditor mengenai *good governance* maka kinerja auditor tersebut semakin meningkat. Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Mastra (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Auditor yang memahami fungsi dan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi khususnya di Kantor Akuntan Publik dapat mewujudkan kondisi lingkungan kerja yang baik, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kinerja auditor menjadi lebih baik pula yang berdampak pada peningkatan produktivitas dari Kantor Akuntan Publik.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh Independensi dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020:99) Hipotesis yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah sebuah penelitian, di mana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka, berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H₁: Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor

H₂: Pemahaman Good Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja

Auditor